



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pahlawan Rawang Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/021.1/SK-PERKIMTANLH/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas jabatan Struktural Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja;
- b. Penetapan Kinerja;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan Keputusan ini pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Bidang yang terkait dengan Indikator Kinerja ini.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 22 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MUKHRIDAL, SH

NIP. 196407138 199309 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 800/021.1/SK-PERKIMTANLH/I/2023**

TANGGAL : 22 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026

**Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanian dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET	CAPAIAN					TARGET					
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman												
a	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0.2233	0.2461	0.2220	0.2213	0.2217	0.2224	0.2233	0.2243				
b	Rasio Permukiman Layak Huni	96.8200	96.8095	96.8229	96.8363	96.8497	96.8631	96.8765	96.8900				
c	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni (%)	94.8900	99.8828	90.5208	91.0944	91.7109	92.4139	93.2033	94.0788				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET	CAPAIAN	TARGET					
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
d	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)	50.0000	97.2473	91.1288	92.3430	93.9464	96.3822	99.5050	99.4783
e	Persentase Permukiman Tertata (%)	97.0800	96.8095	96.8229	96.8363	96.8497	96.8631	96.8765	96.8900
f	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0.0754	0.0827	0.0827	0.0824	0.0820	0.0817	0.0813	0.0810
g	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan (%)	4.5200	1.4271	1.8416	2.2561	2.6706	3.0851	3.4996	3.9304
h	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)	13.9900	18.2376	18.1656	18.0938	18.0213	17.9450	17.8649	17.7813

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET	CAPAIAN						TARGET					
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
i	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	17,6500	37,5000	50,0000	60,0000	70,2128	79,5918	88,2353	100					
j	Persentase Areal kawasan Kumuh (%)	0.07540	0.08272	0.08237	0.08202	0.08167	0.08133	0.08098	0.08063					
k	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)		140%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
l	Persentase Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%					
m	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani (%)	7,30 %	7,30 %	7,30 %	10,33 %	13,36 %	16,39 %	19,43 %	22,47 %					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET	TARGET						
		TARGET 2020	CAPAIAN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
d	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
e	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
f	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Lingkungan Hidup								
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan		86,74	72,15	72,45	72,76	73,07	73,38	73,69
			90	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29
			91,81	87,02	87,12	87,22	87,33	87,44	87,55
			71,78	72,72	73,76	74,8	75,84	76,88	77,92

Penjelasan Indikator Kinerja

1. Urusan Perumahan Kawasan Permukiman

a) Rasio Rumah Layak Huni

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

b) Rasio Permukiman Layak Huni

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Luas Permukiman Layak Huni}}{\text{Jumlah wilayah Permukiman}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

c) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni (%)

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

d) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR Yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

e) Persentase Permukiman Tertata (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)
Formulasi : $\frac{\text{Luas Permukiman Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman}} \times 100 \%$
Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS)
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

f) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)
Formulasi : $\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}} \times 100 \%$
Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS)
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

g) Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)
Formulasi : $\frac{\text{Luas Permukiman Kumuh Tertangani}}{\text{Luas Permukiman Kumuh}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

h) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah RT Kumuh Perkotaan}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

i) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Lingkungan Yang di dukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

j) Persentase Areal kawasan Kumuh (%)

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

k) Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

l) Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

m) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

n) Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kab/Kota}} \times 100 \%$

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS)
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

o) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota / Kota}} \times 100 \%$

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS)
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

2. Urusan Pertanahan

a) *Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Luas Lahan Yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

b) *Penyelesaian Kasus tanah Negara*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Kasus Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Yang Terdaftar}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

c) *Penyelesaian izin lokasi (%)*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Permohonan Izin Lokasi}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

d) *Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

e) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan

Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

f) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah gerapan}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan

Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

3. Urusan Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL)$

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

b) Indeks Kualitas Air

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Output)

Formulasi : $PI_{Titik1} = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2 M + (Ci/Lij)^2 R}{2}}$

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

c) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)

Formulasi : $\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total timunan sampah kab/kota}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

d) *Persentase Luasan RTH yang dikelola*

- Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Luas RTH yang dikelola}}{\text{Total Luas RTH}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

e) *Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota*

- Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Penanggung Jawab : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

f) *Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota*

- Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Output)
Formulasi : $\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Penanggung Jawab : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

g) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani

- Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
- Formulasi : $\frac{\text{Pengadaan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100 \%$
- Sumber Data : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- Penanggung Jawab : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Perumahan, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001